

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL TELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK ETALASE PRODUK JASA KEAMANAN**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyesuaian dan pembaruan atas Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG

MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK ETALASE PRODUK JASA KEAMANAN.

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan:
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI NOMOR 62
TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAAHAN
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK JASA
KEAMANAN.

NOMOR : 81 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 APRIL 2022

Menindaklanjuti Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan diperlukan perubahan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Tetap

B. Ringkasan Etalase Produk

Semula:

1. Nama Etalase Produk : Jasa Keamanan
2. Latar Belakang : ☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan
Usulan Produk ☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
☒ Kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa
☐ Kebutuhan dari fitur iklan katalog;
☐ Hasil Laporan *Monitoring* dan Evaluasi
3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog Elektronik yang Katalog memproses Etalase Produk Jasa Keamanan untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik.

Menjadi:

1. Nama Etalase Produk : Jasa Keamanan
2. Latar Belakang : ☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan
Usulan Produk ☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
☒ Kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog;
☐ Usulan dari Pelaku Usaha; dan/atau
☐ Hasil Laporan *Monitoring* dan Evaluasi
3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog Elektronik yang Katalog memproses Etalase Produk Jasa Keamanan untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik.

C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Semula:

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Katalog Elektronik, pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi.

Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

Menjadi:

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

D. Verifikator

Dihapus

BAB II

PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog)

Tetap

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

Semula:

1. Memiliki Surat Izin Operasional (SIO) Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan yang masih berlaku di wilayah operasional masing-masing yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Memenuhi status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
4. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Menjadi:

1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut: KBLI 80100 (Aktivitas Keamanan Swasta);
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
6. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk/personel yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - a. Gaji minimal Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR);
 - c. BPJS Kesehatan;

- d. BPJS Ketenagakerjaan;
- e. Biaya Seragam Kerja dan atributnya sesuai peraturan perundangan;
- f. *Management Fee*; dan
- g. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Syarat Teknis

Dihapus

D. Syarat Harga

Dihapus

BAB III PROFIL PRODUK

A. Kategori Produk

Tetap

B. Atribut Produk

Semula:

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. Nilai TKDN (%)
8. Masa berlaku produk (masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA))
9. Kewarganegaraan
10. Pendidikan
11. Umur
12. Sertifikasi Kompetensi
13. Kartu Tanda Anggota (KTA)
14. Komponen Biaya
15. Atribut Pengamanan
16. Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun
17. Keterangan lainnya

Menjadi:

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. Nomor Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode KBKI;
7. Nilai TKDN (%);
8. Nilai BMP (%);
9. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
10. Masa Berlaku Produk;
11. Surat Izin Operasional (SIO) Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan;
12. Kewarganegaraan;
13. Pendidikan;
14. Umur;
15. Sertifikasi Kompetensi;

- 16. Kartu Tanda Anggota (KTA);
- 17. Komponen Biaya;
- 18. Atribut Pengamanan;
- 19. Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun;
- 20. Pengalaman Kerja; dan
- 21. Keterangan lainnya;

C. Kelas Harga

Tetap

D. Tampilan Stok Produk

Tetap

E. Butuh Ongkos Kirim

Tetap

F. Duplikasi Pembelian Produk

Tetap

G. Informasi Lainnya

Tetap

BAB IV

PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

Semula:

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar pada Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar pada Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "tanpa merek"
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk (orang per bulan)
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk, termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Produk Impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Wajib diisi	Berisi informasi status TKDN produk (memiliki TKDN atau tidak). Apabila produk memiliki TKDN, maka dapat dilakukan pencarian nomor sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk memunculkan nilai TKDN produk pada Katalog Elektronik
8	Masa berlaku produk (masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA))	Wajib diisi	Berisi informasi masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA)

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
9	Kewarganegaraan	Wajib diisi	Berisi informasi kewarganegaraan personil
10	Pendidikan	Wajib diisi	Berisi informasi pendidikan terakhir personil
11	Umur	Wajib diisi	Berisi informasi umur personil
12	Sertifikasi Kompetensi	Wajib diisi	Berisi informasi nomor sertifikat kompetensi yang dimiliki personil (Sertifikat Gada Utama/Gada Madya/Gada Pratama)
13	Kartu Tanda Anggota (KTA)	Wajib diisi	Berisi informasi nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dimiliki personil
14	Komponen Biaya	Wajib diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, minimal terdiri dari: a) Gaji minimal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK); b) Tunjangan Hari Raya (THR); c) BPJS Kesehatan; d) BPJS Ketenagakerjaan; e) Biaya Seragam Kerja dan atributnya sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan; f) <i>Management Fee</i>; g) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15	Atribut Pengamanan	Wajib diisi	Berisi informasi atribut pengamanan yang melekat pada masing-masing personil berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
16	Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun	Wajib diisi	Berisi informasi jumlah setelan seragam kerja per tahun
17	Keterangan lainnya	Tidak wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

Menjadi:

Kategori: Manager, Supervisor dan Pelaksana

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan.
2	Merek	Wajib Diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar pada Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar pada Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; atau 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan.
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk (orang per bulan).
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi status produk, termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Produk Impor.
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS.
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
10	Masa Berlaku Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku Produk. <i>(Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).</i>
11	Surat Izin Operasional (SIO) Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan	Wajib Diisi	1. Berisi informasi “Nomor Izin Operasional beserta Wilayah Hukum/Operasional” . 2. Berisi keterangan “Tidak memiliki” apabila Pelaku Usaha tidak memiliki Surat Izin Operasional (SIO).
12	Kewarganegaraan	Wajib Diisi	Berisi informasi kewarganegaraan personel.
13	Pendidikan	Wajib Diisi	Berisi informasi pendidikan terakhir personel.
14	Umur	Wajib Diisi	Berisi informasi umur personel.
15	Sertifikasi Kompetensi	Wajib Diisi	1. Berisi informasi “Nomor sertifikat Kompetensi” yang dimiliki personel sesuai peraturan perundangan. a. Apabila <i>Manager</i> , maka diisi dengan "Gada Utama". b. Apabila <i>Supervisor</i> , maka diisi dengan "Gada Madya". c. Apabila Pelaksana, maka diisi dengan "Gada Pratama". 2. Berisi keterangan “Tidak memiliki” apabila Pelaku

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			Usaha tidak memiliki Sertifikat Kompetensi.
16	Kartu Tanda Anggota (KTA)	Wajib Diisi	1. Berisi informasi “Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA)” yang dimiliki personel. 2. Berisi keterangan “Tidak memiliki” apabila Pelaku Usaha tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
17	Komponen Biaya	Wajib Diisi	Berisi informasi harga produk (personel yang ditawarkan) yang minimal terdiri dari: 1. Gaji minimal Upah Minimum Kabupaten/Kota; 2. Tunjangan Hari Raya (THR); 3. BPJS Kesehatan; 4. BPJS Ketenagakerjaan; 5. Biaya Seragam Kerja dan atributnya sesuai Peraturan Perundangan; 6. <i>Management Fee</i>; dan 7. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
18	Atribut Pengamanan	Wajib Diisi	Berisi informasi atribut pengamanan yang melekat pada masing-masing personel berdasarkan peraturan perundangan.
19	Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun	Wajib Diisi	Berisi informasi jumlah setelan seragam kerja per tahun.
20	Pengalaman Pekerjaan	Wajib Diisi	1. Berisi informasi “Pengalaman kerja personel pada bidang jasa keamanan”. 2. Berisi keterangan “Tidak memiliki” apabila personel belum memiliki pengalaman kerja pada bidang jasa keamanan.

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
21	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

Demikian perubahan Penelaahan Produk Katalog Elektronik ini dibuat, apabila terdapat informasi terbaru dan tidak sesuai dengan Penelaahan Produk yang sudah disusun maka akan dilakukan penyesuaian terhadap penelaahan ini.

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



GATOT PAMBUDHI POETRANTO